

BAB II

DIPLOMASI ACEH SEBELUM DAN SESUDAH BENCANA TSUNAMI

Pemerintah Aceh telah melewati beberapa tahap perjuangan dalam bentuk perang dan juga diplomasi dengan jalan damai. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan serangkaian dinamika perjalanan Aceh sejak awal mula pada masa kerajaan hingga masa-masa sebelum bencana tsunami tahun 2004, yang mana pembahasannya meliputi bentuk pemerintahan Aceh, Undang-Undang yang mendukung keistimewaan Aceh dan kerjasama-kerjasama luar negeri yang pernah dilakukan oleh pemerintah Aceh.

A. Dinamika Politik Aceh

Aceh adalah salah satu provinsi yang terletak di bagian paling barat pulau Sumatra. Berdasarkan catatan sejarah, Aceh merupakan tempat pertama kali masuknya budaya dan juga agama, hal ini dikarenakan Aceh adalah tempat persinggahan para pedagang dari Eropa, Arab, India dan China. Namun di antara beberapa budaya dan agama, Aceh paling menonjol dalam perkembangan agama Islam yang dibawa oleh pedagang dari arab pada abad ke 9.

Pada awalnya Aceh merupakan daerah kerajaan, yakni Kerajaan Peureulak dan Pasai. Kerajaan yang dibangun oleh Sultan Ali Mughayatsyah dengan ibukotanya di Kutaraja (Banda Aceh sekarang), lambat laun wilayahnya bertambah luas yang meliputi sebagian besar pantai Barat dan Timur Sumatra hingga ke Semenanjung Malaka. Kehadiran daerah ini semakin bertambah kokoh dengan terbentuknya Kesultanan Aceh yang mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang terdapat di daerah itu. Dengan demikian Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada permulaan abad ke-17, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh, sehingga daerah ini mendapat julukan “Seuramo Mekkah” (Serambi Mekkah). Keadaan ini tidak berlangsung lama, karena sepeninggal Sultan Iskandar Muda para penggantinya tidak mampu mempertahankan kebesaran kerajaan tersebut. Sehingga kedudukan daerah ini - sebagai salah satu kerajaan besar di

Asia Tenggara - melemah. Hal ini menyebabkan wibawa kerajaan semakin merosot dan mulai dimasuki pengaruh dari luar.¹

Pengaruh luar cukup besar, terutama dari Negara-negara barat seperti Inggris dan Belanda. Pada 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang terhadap kesultanan Aceh, puncak kekalahan Aceh dialami pada masa sultan terakhir Aceh, Twk. Muhammad Daud. Sejak saat itu, Aceh secara administratif masuk ke dalam Hindia Timur Belanda (Nederlansch Oost-Indie),² namun pemberontakan dari pada griliyawan Aceh terus berlangsung. Pada tahun 1942, peperangan beralih melawan Jepang, seiring berkurangnya kekuatan Belanda di Indonesia. Peperangan ini pun berakhir setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, dan Aceh akhirnya bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



Gambar I : Peta Aceh³

¹<http://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html>, diakses pada 03 Maret 2016

² Ibid

³<http://www.communitywebs.org/NetworkforTsunamiAceh/images/acehmap.jpg>. Diakses pada 10 Maret 2016

Aceh telah mengalami beberapa perubahan status dalam kebersamaannya dengan NKRI. Pada masa revolusi kemerdekaan, aceh hanya berbentuk residen (1947) di bawah administratif Sumatera Utara. Pada tahun 1949 status Aceh ditingkatkan menjadi provinsi Aceh, dengan Tengku Muhammad Daud Bereueh menjadi gubernurnya. Berdasarkan peraturan pemerintah melalui UU No. 5 tahun 1950, Aceh kembali ke dalam bentuk residen. Akibat keputusan ini, timbul gejolak politik di Aceh. Untuk menjaga kestabilan politik, Aceh dikembalikan ke dalam bentuk Provinsi pada tahun 1956.

Dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, status Provinsi Aceh menjadi Daerah Swatantra Tingkat I dan pada tanggal 27 Januari 1957 A. Hasjmy dilantik sebagai Gubernur Provinsi Aceh. Namun gejolak politik di Aceh belum seluruhnya berakhir. Untuk menjaga stabilitas Nasional demi persatuan dan kesatuan bangsa, melalui misi Perdana Menteri Hardi yang dikenal dengan nama "Missi Hardi" tahun 1959, dilakukan pembicaraan yang berhubungan dengan gejolak politik, pemerintahan dan pembangunan daerah Aceh. Hasil misi tersebut ditindak lanjuti dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/MISSI/1959. Maka sejak tanggal 26 Mei 1959 Daerah Swatantra Tingkat I atau Provinsi Aceh diberi status "Daerah Istimewa" dengan sebutan lengkap "Provinsi Daerah Istimewa Aceh." Dengan predikat tersebut, Aceh memiliki hak-hak otonomi yang luas dalam bidang agama, adat dan pendidikan. Status ini dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.⁴

Namun, Pergelotan politik Aceh masih terus berlanjut, dengan dideklarasikan GAM oleh Hasan Tiro pada tahun 1976. Hal ini ditanggapi oleh pemerintah pusat dengan pemberian Otonomi Khusus dengan disahkannya Undang-Undang no. 18 tahun 2002 dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh berubah menjadi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penggunaan Sebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh tertanggal 7 April 2009, ditegaskan bahwa sebutan Daerah

⁴ Ibid

Otonom, Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Nomenklatur dan Papan Nama Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Titelatur Penandatanganan, Stempel Jabatan dan Stempel Instansi dalam Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Aceh, diubah dan diseragamkan dari sebutan/nomenklatur "Nanggroe Aceh Darussalam" (NAD) menjadi sebutan/nomenklatur " Aceh ". Ini dilakukan sambil menunggu ketentuan dalam Pasal 251 UU Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa nama Aceh sebagai provinsi dalam sistem NKRI, akan ditentukan oleh DPRA hasil Pemilu 2009.⁵

Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, Aceh tetap di bawah sistem pemerintahan Indonesia, Pemerintah Aceh diberi wewenang kerjasama dengan pihak asing berdasarkan undang-undang 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, undang-undang tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan undang-undang tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Peraturan Presiden tahun 2010 tentang kerjasama Pemerintah Aceh dengan daerah, lembaga dan badan internasional.

Dengan adanya wewenang tersebut, Pemerintah Aceh harus mempunyai kekuatan dalam berdiplomasi untuk meningkatkan kualitas *bargaining* (tawar menawar) dengan lawan pihak diplomasi, sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kerjasama untuk pembangunan Aceh yang lebih baik. Kekuatan inilah yang kemudian kami sebut *Soft power Diplomacy*.

B. Diplomasi Aceh Sebelum Bencana Tsunami

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kemudian presiden Soekarno pada tahun 1948 berkunjung ke Aceh serta bertemu dengan Tengku Daud Beureu'eh, meminta dukungan Aceh untuk bergabung dengan Indonesia. Dengan seperangkat undang-undang yang telah dijelaskan pada awal pembahasan bab ini, Aceh kembali dapat melakukan hubungan luar negeri, namun dengan *soft power diplomacy* yang berbeda. *Soft Power diplomacy*

⁵ibid

Pemerintahan Aceh tahun 1999-2004 (sebelum bencana tsunami) hanya dari segi seni budaya, yang mana banyak daerah lain juga mempunyai hal serupa.

Konflik politik yang terjadi di Aceh selama lebih dari 30 tahun, membuat perkembangan diplomasinya tidak maksimal. Pada masa konflik ini, hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Aceh hanya mencari dukungan dari pihak asing. Pihak asing yang dianggap terlibat membantu pihak Aceh (GAM) pada masa konflik adalah Swedia dan Libya. Kalau Swedia membantu melindungi para petinggi GAM, di Libya menjadi tempat pelatihan tentara GAM.⁶ Konflik ini terus berlanjut hingga tahun 2004.

Salah satu langkah perdamaian yang dilakukan pihak GAM dan RI untuk menyelesaikan konflik adalah dengan dibuatnya kesepakatan penghentian permusuhan atau dikenal dengan istilah *The Cessation Of Hostilities Of Agreement* (CoHA).⁷ Kesepakatan ini terjadi pada tanggal 9 Desember 2002 di Jenewa, kegiatan ini difasilitasi oleh organisasi non pemerintah, *Henry Dunant Centre (HDC)*. Sebenarnya pembuatan kesepakatan ini bukanlah sebuah penyelesaian konflik, melainkan ini hanyalah sebuah langkah awal yang masih berupa kerangka kerja yang akan dilakukan kedua belah pihak agar bisa menuju negosiasi yang sesungguhnya. Penciptaan kesepakatan *CoHA* ini agar kedua belah pihak bisa melakukan penjajakan dan menjalin kemistri untuk kemudian melakukan perundingan.

Sejak awal kesepakatan, bukannya terbentuk kesepakatan, melainkan kedua belah pihak saling menaruh curiga antara satu pihak dengan pihak lain, tentang tujuan dari diadakannya kesepakatan penghentian permusuhan. RI menaruh curiga kepada GAM sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih luas dan kuat dalam mempersiapkan kemerdekaan. Begitu juga GAM mencurigai RI sedang memperhatikan tokoh-tokoh besar yang mejadi dalang pemberontakan selama ini.

⁶ Kirsten, E. Schulze, *The Free Aceh Movement (GAM) : Anatomy of Separatist Organisation*, ast West Washington, Washington DC, 2004. Hal. 29

⁷ Internasional Crisis Group (ICG), *Aceh sebuah perdamaian yang rapuh*, ICG Asia report N^o47, 27 Februari 2003

Dengan kecurigaan-kecurigaan ini membuat kesepakatan yang dilakukan dan langkah membuat perundingan menjadi sangat lemah. Dari kesepakatan ini diharapkan tidak terjadi lagi kontak senjata, namun yang terjadi tetap masih ada kontak senjata meskipun tidak sesering sebelum terjadi kesepakatan. Meskipun begitu, kesepakatan ini cukup menjadi langkah awal untuk membuat kesepakatan selanjutnya yang lebih besar.

Soft Power Diplomacy Aceh sebelum terjadinya bencana tsunami cukup lemah, dengan hanya membawa ideologi kemerdekaan, tanpa sedikit pun mengurangi tensi serangan di tengah kekuatan tentara Aceh yang sebelumnya belum cukup kuat. Namun semua ini berubah dengan datangnya bencana tsunami. Pemerintah seakan-akan menemukan kekuatan baru untuk berdiplomasi di tingkat lokal dan juga internasional.

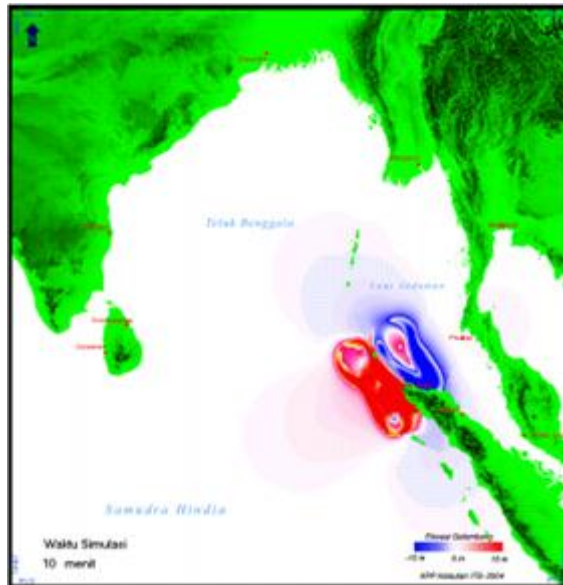
C. Bencana Tsunami, sebagai Media Diplomasi Aceh

Bencana sudah menjadi bagian dalam dinamika kehidupan manusia. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat bencana terbesar di dunia, mulai dari banjir, longsor, gunung meletus, gempa, dan lain sebagainya. Sepanjang tahun 2000-an, sudah banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia. Bencana alam terparah yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2000-an yaitu bencana tsunami yang melanda provinsi Aceh pada tahun 2004 silam.

Istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu *Tsu* yang berarti “Pelabuhan”, dan *Nami* yang berarti “gelombang”, sehingga tsunami dapat diartikan sebagai “gelombang pelabuhan.” Istilah ini pertama kali muncul di kalangan nelayan Jepang. Diberi sebutan seperti itu karena panjang gelombang tsunami sangat besar pada saat berada di tengah laut sampai-sampai para nelayan tidak merasakan adanya gelombang ini, namun ketika mereka tiba di pelabuhan, mereka mendapati wilayah disekitar pelabuhan rusak parah. Dengan alasan ini mereka menyimpulkan bahwa gelombang ini hanya timbul di wilayah sekitar pelabuhan, dan tidak terjadi di tengah lautan yang dalam.⁸

⁸Nanin Trianawati sugito, *Tsunami*, Universitas pendidikan Indonesia, 2008. Hal. 1

Gempa dan tsunami di Indonesia (Aceh) terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 yang telah menyebabkan korban meninggal lebih dari 200.000 orang di berbagai Negara. Gempa yang terjadi di Aceh ini adalah gempa terbesar selama 40 tahun terakhir.⁹



Gambar II. Gelombang Tsunami Aceh¹⁰

Bencana Tsunami di Aceh terjadi berbarengan dengan permasalahan politik yang terjadi di provinsi tersebut. Bencana Tsunami ini menarik perhatian dunia yang bersimpati dengan bencana dan korban tewas yang jumlahnya sangat banyak, sekaligus membuat kasus konflik Aceh lebih diketahui di kancan internasional, yakni Konflik separatisme yang melibatkan GAM dan RI. Konflik ini belum terselesaikan meskipun segala upaya telah dilakukan, baik itu dengan jalan perang maupun jalan damai (diplomasi).

Bencana tsunami yang meluluhlantahkan daerah istimewa Aceh, juga mempengaruhi dinamika konflik. Negara yang sebelumnya sedang berkonflik dengan salah satu wilayahnya ini, keduanya mulai “melembut” akibat bencana yang terjadi. Hal ini membuka ruang bagi keduanya untuk menyelesaikan masalah

⁹ Ibid. Hal 31

¹⁰ Sumber : KKP Kelautan ITB, 2004

bersama, yaitu penanggulangan bencana tsunami dan juga mulai menemukan sinergi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan konflik (berdamai).

D. Diplomasi Dalam Penyelesaian Konflik GAM dan RI

Jika pada masa sebelum tsunami, diplomasi yang dilakukan oleh Provinsi Aceh sangat minim dengan pihak mana pun, termasuk dengan dalam negeri. Namun hal berbeda ditunjukkan setelah terjadinya tsunami. Daya tarik Aceh meningkat dan hubungan luar negerinya pun semakin meningkat. Perundingan yang paling alot adalah dalam kasus penyelesaian konflik di Aceh antara GAM dan RI.

Masa presiden Megawati Soekarno Putri sempat dilakukan perundingan dengan meneruskan rangkaian perundingan yang dirintis oleh presiden sebelumnya, Abdurrahman Wahid dalam program *Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA), yang dirancang sebagai jalan untuk mengakhiri perang, dan “mengembalikan” Aceh ke dalam Republik Indonesia, namun praktek ini gagal bahkan Megawati melakukan kesalahan dengan menggantikan kegagalan CoHA ini dengan menerapkan Darurat Militer sejak 19 Mei 2003, yang akhirnya bukan menyelesaikan konflik bahkan membuat penyelesaian konflik GAM-RI semakin sulit.

Faktor alam kemudian mendukung percepatan negosiasi ini, yaitu gempa dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004. Setelah peristiwa ini, pihak asing dengan mudah masuk ke Aceh (teritorial wilayah Indonesia) dengan alasan kemanusiaan. Pihak asing ini meminta jaminan agar bantuan dapat disalurkan dengan lancar, apabila masih terjadi kontak senjata antara GAM dan TNI maka akan mengganggu pemberian bantuan terhadap korban tsunami. Dengan alasan ini juru runding GAM akhirnya menyatakan bahwa demi kepentingan rakyat Aceh, mereka bersedia berunding. Namun faktor alam ini hanyalah pendukung dan percepat negosiasi, karena jalan untuk menuju

perundingan di Helsinki sudah dirintis sejak 2001 oleh Farid Husein atas inisiatif Jusuf Kalla.¹¹

Namun untuk kasus ini, bencana tsunami tidak menjadi poin utama penyebab dilangsungkannya perundingan, tsunami hanya menjadi faktor pendukung dan percepatan terjadinya perundingan. Hal ini disebabkan upaya perundingan telah dilakukan sedemikian rupa di tahun-tahun sebelumnya meskipun puncaknya baru terlaksana dan sukses pada tahun 2005 di Helsinki. Pada perundingan tersebut juga akhirnya di bahas tentang langkah-langkah pembangunan yang dilakukan di provinsi Aceh pasca tsunami, termasuk pembentukan pemerintahan sendiri bagi provinsi Aceh, juga dalam hubungannya dengan pihak asing.

E. Diplomasi Aceh dengan Pihak Asing Pasca Tsunami

Bermula dari undang-undang No. 22 tahun 1999 yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan hubungan internasional dan menentukan bidang apa saja yang akan dikerjasamakan, selain yang dikecualikan dalam undang-undang tersebut, pengaturan mengenai teknis kerjasama luar negeri ini berkembang cukup dinamis. Sebelumnya, untuk melakukan kerjasama luar negeri, daerah masih harus berpedoman pada aturan pelaksanaan, yakni Permendagri No. 1 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri di Jajaran Depdagri. Setelah lahir undang-undang No. 22 tahun 1999, kemudian muncullah Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom yang dengan tegas menyatakan bahwa Pemerintah Pusat berwenang menetapkan pedoman tata cara kerjasama dengan lembaga/badan di luar negeri.¹²

Mengenai teknis kerjasama luar negeri yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah, Departemen Luar Negeri pada bulan Oktober 2003 mengeluarkan

¹¹Moch. Nurhasim, *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2008

¹² Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif hubungan Internasional*, Hal 118, BIGRAF, YK, 2001

Panduan umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah. Dalam panduan tersebut diatur syarat-syarat kerjasama,¹³ antara lain adalah:

1. Dengan Negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka NKRI.
2. Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Mendapat persetujuan DPRD.
4. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri.
5. Tidak mengarah kepada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.
6. Berdasarkan pada asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak.
7. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberi manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
8. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melakukan hubungan dengan negara atau provinsi asing, dapat menempuh cara-cara sebagai berikut :

1. Pendirian kantor-kantor perwakilan (*permanent offices*) di negara-negara lain terutama di pusat-pusat perdagangan dan keuangan dunia.
2. Pertukaran kunjungan pejabat-pejabat pemerintah sub nasional di suatu negara dengan pejabat-pejabat pemerintah sub nasional di negara lain.
3. Pengiriman misi-misi teknik, promosi dagang dan investasi.
4. Pembentukan *foreign tradezone* seperti yang dilakukan oleh 30 negara bagian di Amerika Serikat.
5. Upaya lainnya adalah berpartisipasi dalam organisasi-organisaasi atau konferensi-konferensi internasional.¹⁴

Pemerintah Provinsi Aceh setelah bencana tsunami melakukan kerjasama dengan pihak-pihak asing, baik itu negara dan juga organisasi. Bencana tsunami telah membuka peluang bagi pemerintah provinsi Aceh untuk melakukan

¹³ Takdir Ali Mukti, *Paradiplomasi*,Lihat hal. 187

¹⁴ Tulus Warsito, Materi Kuliah Diplomasi, Magister Hubungan Internasional, UMY. Lihat. Takdir Ali Mukti, *Paradiplomasi*, Hal.173

kerjasama dengan pihak asing dalam bingkai kerjasama luar negeri. Provinsi Aceh yang sebelum tsunami sangat tertutup, kini mulai mengalami proses internasionalisasi akibat dari bencana tsunami. Berikut ini beberapa kerjasama yang terjalin setelah terjadinya bencana tsunami :

1. Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Multi Donor Fund (MDF)

Untuk mendukung rekonstruksi Aceh, Pemerintah Aceh menerima bantuan dari MDF dalam bentuk hibah sejumlah \$ 655 Juta. Berkat kerjasama yang baik antara semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah Aceh dalam merencanakan, membiayai dan melaksanakan proyek, banyak konstruksi yang berhasil seperti rumah, jalan, pelabuhan, instalasi pengolahan air, dan ribuan asset prasarana pedesaan.

Program MDF ini berlangsung hampir 8 tahun mulai dari 2005-2012. Pada periode ini terjadi banyak perubahan ekonomi, sosial dan juga politik.¹⁵ Hal ini sangat dipengaruhi oleh adanya upaya rekonstruksi pasca bencana tsunami secara menyeluruh. Para pendonor dalam MDF terdiri dari Negara-negara maju juga organisasi terkemuka di tingkat internasional. Berikut Pendonor yang tergabung dalam *Multi Donor Fund (MDF)*¹⁶ :

1. Belanda
2. Inggris
3. Bank Dunia
4. Swedia
5. Kanada
6. Norwegia
7. Denmark
8. Jerman
9. Belgia

¹⁵ Disampaikan Oleh Pak Iskandar, Kepala Badan Investasi dan Promosi Aceh pada 30 September 2015 di Batam dalam rangka Knowledge Sharing Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Luar Negeri

¹⁶Multi Donor Fund (MDF), *Java Reconstruction Fund (JRF)*, Rangkaian makalah kerja MDF-JRF : hasil pembelajaran dari rekonstruksi pasca bencana di Indonesia, Rekonstruksi infrastruktur pasca bencana secara tepat guna “pengalaman dari Aceh dan Nias, hal 17

10. Finlandia
11. Bank Pembangunan Asia
12. Amerika Serikat
13. Selandia Baru
14. Irlandia
15. Uni Eropa

2. Kerjasama tentang Perubahan Iklim dan Sektor Kehutanan Tingkat Para Gubernur di Berbagai Negara

Pada tanggal 18 November 2008, 10 Gubernur dari berbagai Negara (Aceh, Papua, California, Illinois, Winconsin, Amapa, Amazonus, Mato Grosso dan Para) menandatangani MoU pada pertemuan puncak perubahan iklim di Los Angles-California. Kerjasama ini membahas tentang kebijakan, pembiayaan, pertukaran teknologi dan penelitian di bidang perubahan iklim, guna mencegah terjadinya emisi dan efek rumah kaca (GHG) serta degradasi hutan (REDD) maka telah disepakati dilakukan kegiatan-kegiatan reboisasi dan pengelolaan hutan.¹⁷

3. Pinjaman *soft Promotion loan* Aceh-Pemerintah Jerman (KFW Bank)

Pada tanggal 12 Juni 2013, gubernur Aceh bersama Wali Nanggroe dan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melangsungkan pertemuan dengan pimpinan KFW Frankfurt Jerman. Bank KFW siap memberikan hibah serta melaksanakan penyempurnaan *Feasibility Study* rencana pembangunan rumah sakit regional dan Puskesmas serta peningkatan sumber daya kesehatan.¹⁸ Kerjasama ini guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Aceh setelah diterjang bencana tsunami.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

4. Kerjasama Di Wilayah IMT-GT Antara Indonesia, Malaysia dan Thailand, Dari Indonesia Salah Satu Perwakilannya Adalah Provinsi Aceh

Kerjasama segitiga ini dalam upaya pembangunan sub regional antara Indonesia, Malaysia dan Thailand.¹⁹ Hubungan kerjasama yang terjalin berkat kedekatan geografis, sejarah, budaya dan bahasa ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada setiap daerah. Provinsi Aceh adalah salah satu daerah yang mempunyai peran yang cukup besar dalam kerjasama ini.

Hubungan kerjasama antara tiga Negara ini dilakukan oleh pemerintahan Provinsi yang ada dalam Negara tersebut. Daerah-daerah yang mewakili kerjasama ini adalah :

- 14 provinsi di Thailand Selatan (Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Phattalung, Satun, Songkhla, Trang, Yala, Chumphon, Ranong, Surat Thani, Phang Nga, Phuket)
- 8 negara bagian Semenanjung Malaysia (Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Perlis dan Selangor)
- 10 provinsi di Pulau Sumatera di Indonesia (Aceh, Bangka-Belitung, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat)

¹⁹<http://id.reingex.com/IMT-Growth-Triangle.shtml>. Diakses pada 23 Juni 2016



Gambar III : Kerjasama IMT-GT

5. Kerjasama dengan Swiscontact dan *Canadian Cooperation Asosiation* (CCA)

Selain bekerjasama dengan Negara-negara, Aceh juga bekerjasama dengan NGO, seperti Swiscontact dan CCA. Dalam upaya pemulihan perekonomian masyarakat Aceh, pemerintah berupaya memberi bantuan di bidang pertanian. Melalui kerjasamanya dengan Swiscontact, masyarakat mendapat pembinaan dalam hal pemilihan bibit unggul dalam penanaman kakao.

Dalam program ini, telah dilatih 12.540 petani kakao di Aceh dengan membuka Sekolah lapang (SL) yang menerapkan metode budidaya (PsPSP), selain itu juga dilakukan binaan dalam hal rehabilitasi dan pasca panen. Swisscontact bersama pemerintah Aceh juga menghadiri World Cocoa

Conference di Utrich, Belanda pada tahun 2010 dan di Washington pada tahun 2012.²⁰

Sedangkan CCA juga bekerjasama dengan Aceh di bidang pertanian. CCA telah membantu para petani dengan memberikan bibit unggul SRI kepada para petani yang berada di wilayah Aceh Jaya dan Pidie, selain itu CCA juga membantu pembangunan koperasi di Pidie dan memberikan modal serta pelatihan kepada para petani. Berbeda dengan Swiscontact yang bekerjasama di bidang peningkatan pertanian di bidang kakao, CCA membantu pertanian padi, yang merupakan mayoritas petani di Aceh bergerak di bidang tersebut.

6. Kerjasama *Indonesia-Middle East Update* (IMEU)

Indonesia-Middle East Update (IMEU) adalah salah satu bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Negara-negara Timur Tengah. Dalam praktiknya pemerintah daerah menjadi fasilitator bagi pengusaha lokal dan pengusaha dari Timur Tengah untuk bekerjasama, atau juga kerjasama antara pemerintah kota dengan pengusaha asal Timur Tengah. IMEU merupakan *event* tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui kemenlu dan Direktorat Timur Tengah. Aktivitas kerjasama ini di antaranya adalah pertemuan antar pengusaha lokal dan pengusaha Timur tengah pada tanggal 17-20 Oktober 2016 di Banda Aceh. Salah satu pengusaha dari Timur Tengah Bara Ali Abderrahmane berinvestasi untuk membangun hotel bintang 4 di pulau Sabang. Dalam mendukung aktivitas ini, pemerintah melalui KBRI dan Pemerintah Provinsi Aceh mengintensifkan komunikasi antara pihak lokal dengan Bara Ali. *Alhasil* pada tanggal 9-11 Februari 2016, Bara Ali dan Pemerintah kota Sabang menandatangani MoU kerjasama pembangunan Hotel di Sabang.²¹

Menyusul komitmen Bara Ali untuk berinvestasi sebagai tindak lanjut IMEU 2015, pengusaha lain peserta IMEU dari Dubai (Persatuan Emirat Arab), Mohamed I.M. Farajallah, juga telah kembali berkunjung ke Aceh pada 16-18 Maret 2016. Dalam kunjungan tersebut, Farajallah bertemu dengan Direktur

²⁰ Op.Cit

²¹ Agus Hidayatulloh, *Tindak lanjut Indonesia-Middle east update 2015*. Data ini didapatkan dari Bainprom Aceh

Utama PT. Incona Mega, Sayed Fairuz Syah, untuk menjajaki kerja sama bisnis properti di Banda Aceh.²²

Menurut informasi yang dihimpun dari Badan Investasi dan Promosi (Bainprom) Provinsi Aceh, ada pula peserta IMEU 2015 lainnya yang telah melakukan kunjungan kembali ke Aceh, di antaranya 2 pengusaha dari Yordania. Para pengusaha ini tidak semuanya tercatat oleh Direktorat Timur Tengah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pada IMEU 2015 lalu, digelar pula *one-on-one business meeting* antara pengusaha asing dan pengusaha lokal sehingga memudahkan mereka untuk berkomunikasi secara langsung. Bainprom Aceh menyatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan para peserta IMEU 2015 dan mendorong mereka untuk berinvestasi atau bekerja sama dengan para pengusaha daerah.

²²*Ibid*